

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Mudjiono, 1992. *Hukum Agraria*, (Yogyakarta: Liberty, 1992).
- Erna Sri Wibawanti, 2013. *Hak Atas Tanah dan Peralihannya*, (Yogyakarta: Liberty, 2013).
- Diana Sari, *Konsep Dasar Perpajakan*, (Bandung: Refika Aditama, 2013).
- Santoso, Urip, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*. (Jakarta: Kencana, 2010).
- Abimanyu, dkk. *Era Baru Kebijakan Fiskal, Pemikiran, Konsep dan Implementasi*. (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2009).
- Sumarsan, Thomas. *Perpajakan Indonesia: Pedoman Perpajakan yang Lengkap berdasarkan Undang-Undang Terbaru*, (Jakarta: Indeks, 2010).
- Mardiasmo. *Perpajakan. Edisi Terbaru 2016*. (ANDI, Yogyakarta: ANDI, 2016).
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 2005).
- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012).
- Sukmadinata, Nana Syaodih, *Metode Penelitian Pendidikan*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012).
- Zuraida, Ida dan Hari Sih Advianto, *Penagihan Pajak: Pajak Pusat dan Pajak Daerah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011).
- Suteki and Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)* (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2020).

- Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik* (Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 2003).
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UIPerss), 1986).
- Mukti Fajar ND and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016).
- Fitrah, dan Luthfiah, *Metode Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas, & Studi Kasus* (Sukabumi, CV Jejak, 2017).
- Brotodihardjo, Santoso. *Pengantar Ilmu hukum Pajak*. (Bandung: PT Refika Aditama, 2013).
- Butarbutar, Russel, *Hukum Pajak Indonesia dan Internasional*, (Bekasi: Gramata Publishing Anggota IKAPI, 2017).
- Resmi, Siti. *Perpajakan Teori dan Kasus* (Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2019),
- Usman dan Subroto, *Pajak-Pajak Indonesia*. (Jakarta: Majalah Mingguan “Berita Pajak”, 1977)
- Pahala, Marihot. *Hukum Pajak Material*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010).
- Irianto, Edi Slamet. *Pajak Kepemimpinan dan Masa Depan: Kanwil DjP Jateng 1*. (Dreamlight apps: Semarang, 2015),
- Resmi, Siti. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. (Edisi 5 Buku 1. Salemba Empat: Jakarta, 2009),
- Judisseno, Rimsky K. *Perpajakan Edisi Revisi* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004)

John Salindeho, Masalah Tanah dalam Pembangunan, (Jakarta: Sinar Grafika, 1993).

Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016)

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang, “Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2010-2015”.

Nurmantu, Safri. *Pengantar Perpajakan*. (Jakarta: Granit, 200).

Jurnal

Ravianto, Ronal, “Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Dengan Pendekatan *SelfAssessment System*”. (Jurnal akta Vol. 4 No. 4 Desember 2017)

Handoko, Rukiah. “Prinsip-Prinsip Hukum Governance Publik Yang Baik”. (Jurnal hukum dan pembangunan Nomor 2 Tahun XXXII)

Nisa, Indah Chairun. “Pengaruh Sistem Pemungutan Pajak, Pelayanan Fiskus Dan Efektifitas Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Layanan Drive Thru Sebagai Variabel Moderating”. Skripsi, (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2017).

Annisa Ulul Azmiya, “Analisis Tentang Kebijakan Pemungutan Pajak Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Usaha Mikro, Kecil, Dan Mengangah (Ukm) Ditinjau Dari Asas-Asas Pemungutan Pajak”. (Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB UB Vol. 2 No.2, 2014).

Anwar Syahdat, dkk, “Tinjauan Pelaksanaan Pengalihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Menjadi Pajak Daerah”.

(Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2011).

Pancawati, Fauziana. “Implementasi Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Karena Pewarisan (Studi di Kantor Pertanahan Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah)”. Skripsi. (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, 2015).

Fredrik Mayore Saranaung, “Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997”. (Jurnal Lex Crimen Vol. VI No. 1, 2017).

Anzala Sakinah, “Implementasi Kebijakan Sistem Pemungutan Pajak *Self Assessment* (Studi Kasus pada Pajak Restoran di Kota Probolinggo Provinsi Jawa Timur)”. (Jurnal Kebijakan Pemerintahan — FPP IPDN Vol. 1, No. 1, Juni 2018).

Evan Wiradharma Sundah dan Agus Arianto Toly, “Pengaruh Kemudahan Sistem *Self Assessment*, Sosialisasi Sistem Perpajakan, Dan Pelayanan Kantor Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kabupaten Tulungagung Tahun 2014”. (Jurnal Tax & Accounting Review, Vol. 4, No.1, 2014)

Wawancara

Bambang Riyadi (Pejabat Pembuat Akta Tanah), Wawancara, Kantor PPAT/Notaris Bambang Riyadi, S.H., (Semarang: 23 Desember, 2022).

Muhammad Hafidh (Pejabat Pembuat Akta Tanah), Wawancara, Kantor PPAT/Notaris Muhammad Hafidh, S.H., (Semarang: 4 januari, 2023).

Megah Ernawati (Pejabat Pembuat Akta Tanah), Wawancara, Kantor PPAT/Notaris Megah Ernawati, S.H., (Semarang: 5 januari, 2023).

Ernawati Liestyorini (Staff Pendataan dan Pendaftaran Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang), Wawancara, Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang, S.H., (Semarang: 5 Januari, 2023).

Nanik Kusudji (Wajib Pajak BPHTB atas waris), Wawancara, (Semarang: 20 Desember 2022)

Setyawati Prawaningtyas (Wajib Pajak BPHTB atas Jual-Beli), Wawancara, (Semarang: 22 Desember, 2022)

Yati (Wajib Pajak BPHTB atas Jual-Beli), Wawancara, (Semarang: 23 Desember, 2022)

Artikel

Kemenkeu RI, “Pendapatan Asli Daerah”, terdapat dalam <https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah> (diakses 25 September 2022)

Badan Pusat Statistik, “*Realisasi Pendapatan Pemerintah Kota Semarang Menurut Jenis Pendapatan (rupiah), 2016 – 2020*”. Terdapat dalam <https://semarangkota.bps.go.id/statictable/2021/05/04/155/realisasi-pendapatan-pemerintah-kota-semarang-menurut-jenis-pendapatan-rupiah-2016---2020.html> (diakses 2 November 2022)

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, “Jumlah Penduduk Kota Semarang”, terdapat dalam <https://www.dispendukcapil.semarangkota.go.id/statistik/jumlah-penduduk-kota-semarang/2022-06-16> (diakses 3 November 2022)

Galih Permadi, “92,29 Persen Tanah di Kota Semarang Berhasil Disertifikatkan”, terdapat dalam <https://jateng.tribunnews.com/2020/01/27/9229-persen-tanah-di->

kota-semarang-berhasil-disertifikatkan. (diakses 3 November 2022)

Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang, “*Informasi Pendapatan Pajak Daerah Terkini*”, terdapat dalam <https://realtime2.bapenda.semarangkota.go.id/> (diakses 24 November 2022)

Bapenda, “Pajak Daerah”. 2021. https://www.bapenda.sukabumikab.go.id/wp-content/uploads/2021/02/pajak_daerah-1.pdf. (diakses 25 September)

Pemerintah Kota Semarang, “Gambaran Umum”. <https://semarangkota.go.id/mainmenu/detail/profil> (diakses pada 1 Februari 2023)

https://bappeda.semarangkota.go.id/uploaded/publikasi/BAB_II.pdf

Lia Dina Yunita, “Pendapatan Kota Semarang Tahun 2022 Lampau Target Hingga Rp 5,13 Triliun”. 2023. <https://www.rmoljawatengah.id/pendapatan-kota-semarang-tahun-2022-lampau-target-hingga-rp-513-triliun> (diakses 1 Februari 2023)

Galih Permadi, “92,29 Persen Tanah di Kota Semarang Berhasil Disertifikatkan”, terdapat dalam <https://jateng.tribunnews.com/2020/01/27/9229-persen-tanah-di-kota-semarang-berhasil-disertifikatkan>. (diakses 3 November 2022)

Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang, “*Informasi Pendapatan Pajak Daerah Terkini*”, terdapat dalam <https://realtime2.bapenda.semarangkota.go.id/> (diakses 24 November 2022)

Peraturan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang No. 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 111 Tahun 2000 tentang Pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan karena Waris dan Hibah Wasiat;

Peraturan Pemerintah Nomor 112 Tahun 2000 tentang Pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan karena Pemberian Hak Pengelolaan;

Peraturan Pemerintah Nomor 113 Tahun 2000 tentang Besarnya Nilai Perolehan Obyek Pajak Tidak Kena Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB)

Peraturan Walikota Semarang Nomor 64 Tahun 2021 Tentang Petunjuk
Pelaksana Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun
2011 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Peraturan Walikota Semarang Nomor 68 Tahun 2022 Tentang Perubahan
Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 64 Tahun 2021
Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang
Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah
Dan Bangunan